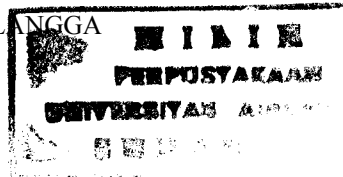


## **BAB II**

# **KONDISI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KOTA SURABAYA**



## BAB II

### KONDISI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KOTA SURABAYA

Kemunculan sampah di kota Surabaya memang sejak awal telah ada sejak kota Surabaya belum ditetapkan sebagai *gemeente* (kotapraja). Namun, perkembangan kota yang mulai nampak pesat pasca kota Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada awal abad ke-20 membuat sampah menjadi problem penting yang harus diatasi karena hal ini menyangkut konsekuensi suatu kota agar nyaman dan layak ditinggali oleh penghuninya.

Kondisi kesehatan lingkungan kota berkaitan erat dengan berbagai hal yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Persinggungan antara jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menampilkan seberapa besar tingkat konsumsi dan kebutuhan masyarakat kota Surabaya. Tingkat konsumsi masyarakat menunjukkan sejauh mana warga kota yang bersangkutan memproduksi sampah setiap harinya. Selain itu keadaan permukiman dan kebiasaan masyarakat kota dalam memandang kebersihan lingkungan serta tubuhnya juga sangat penting untuk melihat sejauh mana sampah menjadi persoalan kolektif yang perlu dicari solusinya.

#### A. Kebiasaan Masyarakat Kota Terhadap Kebersihan

Tidak ada definisi yang ketat mengenai kebersihan dan maknanya, dalam hal konteks apa sesuatu ataupun seseorang dianggap bersih. Alasannya, wacana kebersihan lebih menyangkut dengan cara pandang dan bagaimana cara pandang

itu dikonstruksi dan direproduksi, yang dapat membentuk pemahaman seseorang atas apa yang dianggap bersih dan kotor. Definisi kebersihan dan posisi orang yang lebih berbudaya relatif terkait dengan cara pandang dan relasi sosial yang bersinggungan dalam memaknai kebersihan.<sup>1</sup>

Konteks persepsi mengenai kebersihan yang ditampilkan disini adalah berawal dari stereotip antara orang Belanda dan bumiputera. Anggapan bahwa orang bumiputera primitif, kotor dan pemalas itu sebagai bentuk cerminan kebalikan dari Belanda (Barat) yang unggul, kuat dan berperadaban. Stereotip ini tidak hanya mengakar dan bahkan menjadi pembenar dunia Barat untuk melakukan kolonialisasi dan pengontrolan, yang dianggap sebagai proses pemberadaban.<sup>2</sup>

Memahami tentang realitas kebiasaan masyarakat kota dalam hal kebersihan. Tentunya memerlukan suatu pengantar untuk melihat sejauh mana kebiasaan itu menjadi berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Dalam hal ini jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi menjadi beberapa hal yang penting diungkapkan untuk melihat sejauh mana kebiasaan dalam hal kebersihan terutama dalam memproduksi sampah masyarakat kota.

Paruh pertama abad ke-20 menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di kota Surabaya sejajar dengan perkembangan kota-kota lain, hal ini menunjukkan

---

<sup>1</sup> Wahyudi Akmaliah Muhammad, "Politik Wacana Budaya Kebersihan dalam Paskakolonial Indonesia" , *Jurnal Humaniora Volume 38, No.2 Desember 2012*, hlm. 477.

<sup>2</sup> *Ibid.*

adanya tingkat kemajuan kota dengan berpengaruhnya jumlah penduduk.<sup>3</sup> Sejak ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1906, penduduk Surabaya tercatat mencapai 150.188 jiwa, yang terdiri dari 8.063 orang Eropa, 124.473 orang bumiputera, 14.843 orang Cina (Tionghoa), 2.482 orang Arab dan 327 orang Timur Asing lainnya. Sedang luas kota Surabaya saat itu adalah 4.275 Ha.<sup>4</sup>

Pertumbuhan penduduk pada masa selanjutnya terus mengalami kenaikan yang dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel. 1**  
**Penduduk Kota Surabaya Tahun 1920-1940**

Tahun	Eropa	Cina	Arab	Timur Asing	Bumiputera	Jumlah
1920	18.714	18.020	2.593	165	148.411	187.903
1921	19.524	23.206	3.155	363	146.810	193.903
1922	20.105	27.595	3.410	504	148.000	199.614
1923	20.855	30.653	3.639	644	149.000	204.791
1924	22.153	32.005	3.818	847	150.000	208.823
1925	23.314	32.868	3.922	870	196.825	257.799
1926	24.372	33.370	4.040	981	188.977	251.740
1927	23.782	35.077	4.078	1.008	188.977	252.922
1928	24.625	36.389	4.208	1.039	188.977	255.699
1929	25.346	42.768	4.610	1.167	188.977	258.489
1930	26.502	43.288	4.994	1.303	265.872	341.493
1931	27.628	40.781	5.298	1.384	265.872	343.470
1932	26.411	39.792	5.634	1.444	274.000	352.129
1933	26.882	40.533	5.227	1.521	280.000	357.362
1934	27.297	41.749	5.175	1.519	286.000	365.524
1935	27.599	43.650	5.209	1.152	290.000	370.709
1936	28.548	46.219	4.998	900	294.000	377.096
1937	29.783	46.219	4.961	890	294.000	380.853

<sup>3</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya III* (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 47.

<sup>4</sup> Handinoto dan Samuel Hartono, "Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City): Studi tentang Perkembangan 'bentuk dan struktur' Sebuah Kota Pelabuhan Ditinjau dari Perkembangan Transportasi, Akibat Situasi Politik dan Ekonomi dari Abad 13 sampai Abad 21" *Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 35, No. 1, Juli 2007: 88-99*, hlm. 94.

1938	30.687	43.779	4.921	929	294.000	390.989
1939	32.601	45.767	5.148	968	300.000	390.394
1940	34.576	47.884	5.242	1.027	308.000	396.720

Sumber: Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang Kota Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an* (Serpong: Marjin Kiri, 2013), hlm. 35; yang dikumpulkan dari beberapa sumber antara lain: G.H. Von Faber, *Nieuw Soerabaia* (Surabaya: Boekhandel en Drukkerij, 1936); *Verslag der Gemeente Soerabaja over het Jaar 1940*; Bureau van Statistiek Soerabaja, *Statistische berichten der Gemeente Soerabaja jaarnummer 1931* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1932), hlm.1.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk selalu meningkat. Luas kota Surabaya mencapai 8.280 Ha pada tahun 1930-an, dengan jumlah penduduk 341.493 jiwa. Bahkan hanya dalam waktu kurang lebih 25 tahun sejak ditetapkan sebagai *gemeente*, luas kota Surabaya berkembang hampir dua kali lipat. Hal ini bukan saja karena pertumbuhan penduduk secara alamiah (melalui jumlah kelahiran yang ada), melainkan dipengaruhi pula adanya migrasi yang tinggi dari daerah perdesaan di luar kota Surabaya. Kedatangan kaum urban di kota Surabaya ini mencapai puncaknya pada tahun 1920, yakni ketika pertumbuhan penduduk di desa tidak lagi seimbang dengan jumlah lahan pertanian yang ada, sehingga orang-orang desa berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan. Sebagian dari mereka bekerja sebagai pelayan atau pekerja kasar (tukang sampah, kuli pelabuhan pembantu rumah tangga dan lain-lain).<sup>5</sup> Selain karena urbanisasi, faktor lain yang memacu tingginya jumlah penduduk yakni adanya gerakan *gemeente* Surabaya untuk menekan angka

---

<sup>5</sup> Lamijo, "Prostitusi di Surabaya 1852-1930" *Jurnal Lembaran Sejarah, Volume 4, No. 2 Tahun 2002*, hlm. 33.

kematian akibat penyakit dengan cara melakukan perbaikan kampung dengan proyek *Kampongverbetering*.<sup>6</sup>

Penduduk Surabaya terbagi ke dalam beberapa kelompok masyarakat. Kenyataan ini sebagai konsekuensi karena Surabaya merupakan sebuah kota pelabuhan besar di Asia Tenggara. Stratifikasi atau pelapisan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda ini tercantum dalam *Regering Regelement 1854*. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa pembagian status berdasarkan tiga hal yakni, latar belakang rasnya, asal negaranya dan statusnya dalam masyarakat. Oleh karena itu penduduk Surabaya dibagi menjadi tiga golongan besar, yakni *Europeanen*, *Vreemdeoosteringen* dan *Inlanders*.<sup>7</sup> Pembagian stratifikasi sosial ini diciptakan berlapis-lapis berdasarkan etnis secara ketat. Golongan paling utama adalah orang Belanda totok yang beragama Kristen. Di bawah Belanda totok adalah Belanda Indo, dan di bawah Belanda indo adalah orang Tionghoa, Arab, dan Timur Asing. Lapisan paling bawah adalah orang Indonesia (bumiputera).<sup>8</sup>

Stratifikasi sosial yang diciptakan oleh Belanda memiliki dampak yang besar terhadap semua sektor kehidupan. Hal ini tampak dalam bidang sosial,

---

<sup>6</sup> Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang Kota Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an* (Serpong: Marjin Kiri, 2013), hlm. 42.

<sup>7</sup> *Regering Regelement 1854* merupakan konstitusi Hindia Belanda, berdasarkan ini maka raja berkedudukan sebagai penguasa tertinggi atas seluruh daerah koloninya. Pelaksanaan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur Jendral. Sehingga semua orang yang berada di Hindia Belanda wajib menghormati dan menaatinya. Anjarwati Noorjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)* (Semarang: Mesiass, 2004), hlm. 10.

<sup>8</sup> Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 194.

ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan permukiman. Dalam kelompok masyarakat Eropa sendiri terdapat beberapa tingkatan strata sosial yakni Belanda totok dan Belanda Indo.<sup>9</sup>

Stratifikasi sosial bagi golongan Eropa muncul pula dalam sektor ekonomi, kalangan Eropa totok tua menempati jabatan paling tinggi dari semua populasi Eropa. Mereka bekerja sebagai pegawai negeri, tentara, dan direktur perusahaan. Eropa totok muda dan Eropa indo menempati golongan menengah. Eropa Indo merupakan golongan terendah yang pekerjaannya sebagai juru tulis di perusahaan-perusahaan atau pemerintah kolonial.<sup>10</sup>

Aktifitas ekonomi yang menjadi kegiatan warga kota Surabaya juga mempengaruhi jumlah konsumsi yang mereka makan dalam kehidupan sehari-hari. Besarnya tingkat konsumsi tergantung dari jenis pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang. Semakin tinggi jabatan dan penghasilan seseorang, maka pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari pun akan semakin besar. Dalam kerangka etnisitas di Surabaya, kaum Eropa setidaknya menjadi golongan pertama yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini karena kebiasaan makan orang Belanda yang berbeda dengan etnis-etnis yang lain. Jika pada Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 tata cara makan orang Eropa menggunakan *rijsttafel*<sup>11</sup> sebagai

---

<sup>9</sup> Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (XVIII-Medio Abad XX)* (Yogyakarta: Bentang, 2000), hlm. 54.

<sup>10</sup> Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia* (Leiden:KITLV, 1997), hlm. 155.

<sup>11</sup> *Rijsttafel* adalah cara penyajian makanan berisi menu masakan khas penduduk asli (bumiputera) dengan menu utamanya menggunakan nasi. Penyajian *Rijsttafel* pada dasarnya menggunakan konsep ala Eropa yang diawali dengan makanan pembuka (*appetizer*), lalu makanan utama (*main course*), dan diakhiri dengan makanan penutup

konsumsi makanan sehari-hari. Maka pada pertengahan abad ke-20, ketika banyak barang-barang impor didatangkan dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan makanan ala Eropa yang berupa makanan kaleng, kebiasaan makan ala *rijsttafel* kemudian semakin lama ditinggalkan dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam waktu-waktu khusus, penyajian hidangan ala *rijsttafel* sengaja dihidangkan di kehidupan keluarga Eropa. Bahkan ketika itu, *rijsttafel* mengalami semacam formalisasi yang melahirkan berbagai bentuk inovasi penyajian sehingga menunjukkan perkembangan penting dan menarik.

Kebiasaan mengkonsumsi makanan Barat yang ditandai dengan masuknya impor makanan-makanan kaleng dari Eropa seakan menjadi bukti bahwa pada Abad ke-20, orang-orang Belanda berusaha menunjukkan keekklusifannya sebagai golongan pertama dalam rantai stratifikasi sosial di Hindia Belanda. Mereka seakan kembali menjadi manusia Eropa yang asli dengan mengkonsumsi makanan-makanan ala Eropa kala itu. Dalam sebuah data menyebutkan bahwa beberapa makanan kaleng sengaja didatangkan dari Eropa yang rinciannya dapat diketahui pada tabel 2.

---

(*dessert*). Menu yang biasanya disajikan bervariasi dan tergantung selera, menu yang standar biasanya berisi nasi goreng, rendang, opor ayam, sate babi, dilengkapi dengan krupuk dan sambal, serta ditambahkan dengan minuman beralkohol seperti anggur atau gin. Fadly Rahman, *Rijsttafel Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 44-46.



**Tabel. 2**  
**Nilai Impor Makanan Kaleng di Hindia Belanda Tahun 1926-1928**  
**dalam Gulden**

Jenis	1926	1927	1928
Mentega	7.665	6.937	8.125
Keju	1.125	1.265	1.169
Ikan	22.040	21.379	20.046
Daging	2.995	3.420	3.688
Biskuit	4.692	5.123	4.849
Buah-buahan	4.204	4.083	3.745
Sayuran	6.015	6.669	6.807

Sumber: *Handboek of The Netherlands East-Indies 1930* (Buitenzorg: Departement of Agriculture, Industry and Commerce, 1930), hlm. 323.

Dari data-data diatas, bisa dipastikan bahwa konsumsi makanan sehari-hari masyarakat Belanda di Hindia Belanda, khususnya di Surabaya adalah menggunakan roti. Maka, untuk mengkonsumsi roti bahan yang digunakan sebagai pelengkap adalah keju dan mentega. Dalam sebuah pengalaman yang dialami oleh salah satu priyayi dari Bali bernama Ide Anak Agung Gde Agung, ia pernah indekos di rumah keluarga Belanda bernama van Vethoven selama kurun waktu 1934-1937 ketika sekolah di MULO Malang. Diceritakan dalam kesehariannya ketika sarapan pagi ia beserta seluruh keluarga van Vethoven mengkonsumsi roti, keju, telur, selai dan teh, susu atau kopi. Kemudian pada pukul satu siang, mereka makan siang yang terdiri dari kentang, sayuran dan daging, diawali dengan sop dan diakhiri dengan buah-buahan atau puding, pukul setengah lima minum teh dan camilan bersama, dan pada malam harinya sekitar jam setengah delapan malam, mereka makan makan yang terdiri dari roti dan lauk pauk ala kadarnya. Setiap seminggu sekali terkadang disuguhkan makanan ala *rijsttafel* dalam keluarga tersebut, bahkan terkadang juga makan ala *rijsttafel* di

salah satu hotel terkenal di Malang.<sup>12</sup> Meskipun pengalaman yang diutarakan berada di Malang, namun kebiasaan makan roti dapat dipastikan juga dilakukan oleh keluarga-keluarga Eropa baik totok maupun Indo di Surabaya. Dengan aktivitas konsumsi yang bervariasi pada masyarakat Eropa, maka *Reinigingsdienst* membatasi setiap rumah sebesar 60 dm<sup>3</sup><sup>13</sup> per hari. Apabila jumlahnya melebihi ketentuan tersebut maka dikenakan retribusi setiap bulannya sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan dan nominalnya tercantum dalam *vuilnisverordening* (peraturan sampah).<sup>14</sup>

Peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat pada tahun 1930-an dipengaruhi pula oleh maraknya iklan-iklan kebutuhan rumah tangga yang muncul di koran-koran. Pada saat itu hampir semua keperluan rumah tangga diproduksi secara massal oleh perusahaan-perusahaan dan dipasarkan di kota-kota besar, salah satunya adalah Surabaya. Iklan yang banyak beredar pada waktu itu adalah iklan rokok, minuman, susu, obat-obatan, rumah makan, hotel, tembakau, pasta gigi, sabun, radio, lampu, sepeda, sampai mobil dan perjalanan wisata.<sup>15</sup>

Bangsa Belanda yang menghuni Hindia Belanda membawa peradaban Barat mulai dari pakaian, bahasa, kebiasaan, makanan, dan juga kebersihan. Salah

---

<sup>12</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 46-47.

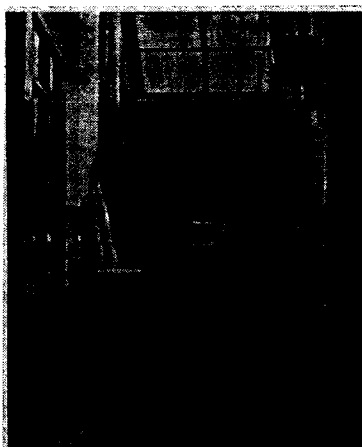
<sup>13</sup> 60 dm<sup>3</sup> setara dengan 0,06 m<sup>3</sup>, dalam konversi internasional 1 m<sup>3</sup> sama dengan 1.000 dm<sup>3</sup>.

<sup>14</sup> *Indische Bouwhygiene Door C.J. De Bruijn Gep Generaal Major Der Genie aanhangsel 1927*, hlm. 147.

<sup>15</sup> Hermanu, *Pikat Pameran Iklan Cetak Generasi ke 2* (Yogyakarta: Penerbit Bentara Budaya, 2006), hlm. 15.

satunya yang menjadi penanda peradaban mereka dalam hal kebersihan adalah penggunaan sabun mandi, sabun cuci, shampoo, temuan toilet duduk, dan pembuangan sampah di bak sampah.<sup>16</sup> Penyikapan terhadap kebersihan ditunjukkan dengan fasilitas yang digunakan, selain itu juga terkait erat dengan persoalan kelas sosial dan status. Bagi orang Eropa dan Indo, membersihkan badan dan melakukan kebutuhan hajat fisik, seperti buang air kecil dan besar dilakukan di ruangan tertutup (kamar mandi atau toilet). Fasilitas privat ini juga tersedia di ruang publik.<sup>17</sup> Lebih jelasnya lihat gambar 1.

**Gambar. 1**  
**Toilet di Salah Satu Rumah orang Belanda di Surabaya**



Sumber: H.F. Tillema, *Kromoblanda Deel II, Over 't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land* (Uden Masman, Den Haag, 1916 ), hlm. 132.

Superioritas peradaban kolonial Belanda salah satunya ditunjukkan dengan tetap menjaga budaya dan gaya hidup kaum Eropa seiring dibukanya Hindia

---

<sup>16</sup> Wahyudi Akmaliah Muhammad, *op. cit.*, hlm. 479.

<sup>17</sup> Jean Gelman Taylor, "Bathing and Hygiene Histories from the KITLV Images Archive", dalam buku Kees van Dijk dan Jean Gelman Taylor (ed.), *Cleanliness and Culture Indonesian Histories* (Leiden: KITLV Press, 2011), hlm. 44-45.

Belanda untuk perusahaan swasta dan para imigran Belanda yang ingin mencari penghidupan yang layak. Hal ini dibuktikan dengan adanya kursus kepribadian dan aktivitas mencuci di *the Colonial School for Women and Girls*, didirikan pada tahun 1920 di Hague, Belanda. Materinya antara lain, bagaimana cara makan dengan sendok dan garpu, adanya petunjuk untuk mengganti pakaian setiap hari, dan membersihkan badan di ruang privat (kamar mandi). Kursus ini kebanyakan ditujukan untuk perempuan dan ibu rumah tangga yang akan menjadi penyangga budaya kebersihan di Hindia Belanda.<sup>18</sup>

Terkait dengan kebersihan tempat tinggal, di setiap rumah orang Eropa pasti terdapat pembantu-pembantu dari kalangan bumiputera dengan berbagai macam pekerjaan untuk setiap bagian tugas rumah tangga. Mereka bertugas membersihkan rumah orang Eropa tersebut beserta membuang sampah keluarga ke tempat sampah yang terletak di bak sampah depan rumah majikannya. Intinya segala urusan kebersihan rumah tangga diserahkan kepada para pembantu ini, sedangkan sang Nyonya Eropa hanya mengawasi pekerjaan mereka. Menurut Locher-Scholten, satu keluarga Eropa setidaknya membutuhkan seorang pembantu pria (*jongos* atau *sepen*), seorang pelayan wanita (*babu*) atau juru masak (*kokki*), dan seorang tukang kebun atau pekerja di kandang kuda (*kebon*) pada awal abad ke-20.<sup>19</sup> Searah dengan semakin tingginya jumlah keluarga Eropa baru yang menghuni Hindia Belanda, ditambah pula dengan semakin tingginya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>19</sup> Elsbeth Locher-Scholten, *Women and the Colonial State. Essay on Gender and Modernity in the Netherland Indies 1900-1942* (Amsterdam: Amsterdam University, 2000), hlm. 89.

tingkat kesejahteraan kaum Eropa di Hindia Belanda. Pada tahun 1931, berdirilah sebuah Asosiasi Wanita Pembantu Rumah Tangga di Hindia (*Vereeniging voor Huisvrouwen in Indie*). Asosiasi ini didirikan sebagai solusi atas kebutuhan pembantu-pembantu berkualitas dan mengetahui tata cara kebiasaan hidup ala Eropa yang banyak dicari oleh keluarga Eropa di Hindia Belanda. Asosiasi ini berfungsi menjadi perantara antara pihak peminta tenaga kerja dan pihak pencari kerja. Pada perkembangannya organisasi ini memberikan kursus ketrampilan menjahit bagi *babu*, kursus singkat mengenai masakan Eropa kepada *kokkie*, dan semacam sekolah lanjutan 2 tahun bagi gadis-gadis dari desa mengenai keterampilan rumah tangga.<sup>20</sup> Keberadaan asosiasi ini menjadi suatu tanda terdapat upaya pembentukan profesionalitas pada golongan wanita asisten rumah tangga.

Masalah kebersihan dan kesehatan juga merupakan titik tekan pemerintah dan masyarakat Eropa dalam memberikan kebijakan atau teguran terhadap pembantu rumah tangga mereka. Kebiasaan dari kampung (dalam pandangan orang Eropa) tidak sehat dan tidak bersih, seperti tidak adanya kebiasaan mencuci baju, mandi, mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya perlu dirubah. Nyonya Eropa yang mendapati putra-putrinya menderita penyakit, akan mudah menyalahkan si *babu* oleh karena standar kebersihan dan kesehatannya yang dinilai membawa wabah penyakit. Di sisi lain, nyonya Eropa

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

tersebut tidak terbiasa mencuci, membersihkan pekerjaan rumah tangga mereka.<sup>21</sup>

Hingga terdapat ungkapan bernada rasis sekaligus sarkastis dari Kloppenburgh-Versteegh, yang berbunyi:

*"Our servants are like big children. Let us try to understand their situation and feel compassion for them, this will urge us to improve their lot, to uplift them. Europeanen (both totok and Indies) women should educate their servants, teach them hygiene, and improve their standard of life"*<sup>22</sup>

"Pembantu kami seperti anak-anak besar. Mari kita mencoba memahami situasi mereka dan merasa kasihan untuk mereka, ini akan mendorong kita untuk memperbaiki nasib mereka, untuk mengangkat mereka. Wanita Eropa (baik totok dan Eropa indo) harus mendidik pegawai mereka (pembantu), mengajari mereka kebersihan, dan meningkatkan standar hidup mereka"

Melalui ungkapan dan kenyataan diatas menunjukkan ada suatu unsur keharusan bagi para pembantu rumah tangga yang bekerja di lingkungan keluarga Eropa untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatannya. Bukan hanya untuk kepentingan majikannya saja dalam urusan pekerjaan, melainkan kehidupan sehari-hari para pembantu tersebut. Salah satu unsur yang secara langsung berkenaan dengan budaya bersih adalah kebiasaan membuang sampah yang benar menurut perilaku warga Eropa.

Golongan nomor dua yang menjadi turut serta dalam aktivitas ekonomi di Surabaya adalah golongan Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda menempatkan orang-orang Tionghoa pada lapisan sosial dan mendapatkan perlakuan tertentu.

---

<sup>21</sup> Kees van Dijk, "Soap is the Onset of Civilization" dalam buku Kees van Dijk dan Jean Gelman Taylor (ed.), *Cleanliness and Culture Indonesian Histories* (Leiden: KITLV Press, 2011), hlm. 26.

<sup>22</sup> Elsbeth Locher-Scholten, *op. cit.*, hlm. 96.

Orang-orang Tionghoa ditempatkan dalam sebuah daerah yang biasa disebut pecinan. Di daerah itu mereka diberi kebebasan untuk memelihara adat istiadat leluhurnya, membangun pusat perdagangan, dan pemerintah kolonial Belanda mengangkat pemuka masyarakatnya yang kemudian disebut *kapiten*.<sup>23</sup> Orang-orang Tionghoa sendiri dalam stratifikasi sosialnya dibagi menjadi dua yakni Tionghoa totok<sup>24</sup> dan Tionghoa peranakan<sup>25</sup>. Orang-orang Tionghoa sejak abad ke-17 terkenal dalam lingkup perdagangan. Peran para pedagang Tionghoa juga tumbuh hingga abad ke-20. Memang fungsi sebagai pedagang tidak selalu identik dengan orang kaya, namun banyak dari mereka menjadi kaya dan menduduki posisi menengah ke atas dalam strata masyarakat.

---

<sup>23</sup> Peter Cary, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825* (Jakarta: Pustaka Aspet, 1985), hlm. 23.

<sup>24</sup> Tionghoa totok adalah penyebutan bagi imigran yang datang dari negeri Tiongkok kemudian menetap di Hindia Belanda baik sebagai warga negara asing maupun beralih kewarganegaraan menjadi warga negara *Nederlandsch Oost-Indie*. Mereka dikenal kokoh mempertahankan kebudayaan tradisi asal Tiongkok dan bahasa yang digunakan adalah mandarin-China. Secara keyakinan agama, mereka menjunjung tinggi adat istiadat China tradisional dan masih bersembahyang di kuil-kuil China untuk memuja nenek moyang. Ikatan orang totok dengan negara asal sangat dekat dan kuat. Pada awal abad ke-20 banyak pendatang Tionghoa datang ke Hindia Belanda dengan membawa istri yang berasal dari Hakka dan Kong Fu (*Cantonese*) *Ibid.*, hlm. 15 dan Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm. 90-91.

<sup>25</sup> Tionghoa peranakan adalah generasi Tionghoa yang hidup turun temurun di Hindia Belanda dan sebagian telah mengalami asimilasi baik antar etnis Tionghoa (umumnya generasi hasil perkawinan ini sudah tidak kenal tanah leluhurnya), maupun yang melakukan asimilasi dan perkawinan campuran dengan non-Tionghoa, terutama orang bumiputera. Bahasa yang digunakan biasanya adalah Melayu Tionghoa. Hal ini karena penggunaan bahasa mandarin tidak aktif lagi karena mereka harus cepat bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Agama yang dianut setidaknya terdapat tiga macam yakni menganut pemujaan leluhur yang tercampur adat bumiputera, ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama Kristen bagi peranakan yang dekat dengan budaya Belanda. *Ibid.*, hlm. 86-87.

Orang Tionghoa dalam kesehariannya secara garis besar tetap menggunakan adat istiadat leluhur mereka, terutama selera atau pola hidup terkait cara pemenuhan kebutuhan makanan. Orang Tionghoa totok atau generasi pertama lebih sering makan dengan makanan khas Tionghoa seperti *cap cay*, *fuyung hai*, bakmi, bakso, nasi goreng, *paklai*, dan babi. Sedangkan Tionghoa peranakan dalam pemenuhan kebutuhannya lebih beragam, hal ini karena terasa lebih berbaur dengan orang bumiputera sehingga dalam segi selera makan juga terdapat pembauran. Terkadang mereka mengkonsumsi masakan khas Tionghoa, namun terkadang juga memakan masakan khas bumiputera. Namun, satu hal yang universal dikonsumsi oleh semua kalangan orang Tionghoa adalah masakan-masakan dengan bahan dasar daging babi. Orang Tionghoa sangat kental dengan masakan yang berbau babi daripada jenis daging lain.<sup>26</sup> Sedangkan golongan opsir-opgir Tionghoa kaya lebih banyak mengadopsi budaya makan ala *rijsttafel* khas Belanda.<sup>27</sup>

Keseharian orang Tionghoa dalam mengkonsumsi makanan seperti yang diungkapkan diatas membuktikan bahwa mereka memproduksi sampah sisa makanan setiap harinya. Sayangnya, penulis tidak menemukan berapa jumlah sampah yang diproduksi oleh masing-masing etnis yang tinggal di Surabaya. Begitu pula dengan keseharian orang Tionghoa dalam mengelola sampah dan pola pemenuhan kebersihan badan. Namun, jika dilihat dari pemberlakuan peraturan sampah yang sudah terlaksana di kawasan pecinan sejak *Reinigingsdienst* berdiri,

---

<sup>26</sup> Riyadi, "Harmonisasi Budaya Tionghoa pada Komunitas Ampyang Surakarta" *Jurnal CANDI Vol. 2 No.2*, hlm. 5.

<sup>27</sup> Fadly Rahman, *op. cit.*, hlm. 51.



maka bisa dipastikan bahwa orang Tionghoa sudah mengenal cara mengelola sampah dengan benar.

Imigran asing yang jumlahnya cukup banyak di Surabaya selain orang Tionghoa adalah orang Arab. Menurut Faber, mereka mulai masuk di kota Surabaya pada awal abad ke-19, dan rata-rata berasal dari Hadramaut (Yaman). Koloni Arab di Surabaya ini kemudian terus berkembang dan berdatangan dari beberapa wilayah di Hadramaut yang kemudian membentuk klan-klan atau keluarga. Mereka memusat di sekitar Masjid Ampel.<sup>28</sup> Aktivitas ekonomi orang Arab di kota Surabaya sebagian besar merupakan perdagangan. Bagi orang Arab yang sederhana, biasanya mereka melakukan penjualan secara eceran dan dengan metode cicilan. Mereka tidak memiliki toko, sehingga cara menjual barangnya secara eceran dengan menawarkannya kepada orang lewat sambil menghisap pipa di muka pintu. Sedangkan bagi orang Arab kaya, mereka memiliki toko kemudian menjual barang eceran di tokonya dan menjual barangnya di kota lain.<sup>29</sup>

Komoditi utama dalam perdagangan orang Arab adalah cita katun dan katun India. Selanjutnya yang banyak diperdagangkan adalah berlian, batu permata, dan aneka komoditi impor dari Eropa.<sup>30</sup> Menurut Faber, Orang-orang Arab juga berdagang bahan bangunan, mengelola pabrik tegel kecil, percetakan,

---

<sup>28</sup> G.H. von Faber, *Nieuw Soerabaia: De Geschiedenis van India's Eerste Kooptad in the Eerste Kwarteeuw Sedert hare Instelling 1906-1931* (Soerabaia: N.V. Boekhandel en Drukkerij H. van Ingen, 1933); hlm. 79.

<sup>29</sup> La Ode Rabani dan Artono, "Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahannya di Kota Surabaya 1900-1942" *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No.2 Tahun 2005*, hlm. 123.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

dan usaha bioskop. Bahkan, menurutnya di Surabaya orang Arab menguasai 1000 dokar yang kemudian menjadi ladang pekerjaan bagi ribuan orang bumiputera di Surabaya.<sup>31</sup> Sayangnya penulis tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keseharian orang Arab dalam hal makanan yang dikonsumsi kala itu ataupun keseharian yang berhubungan dengan kebersihan etnis tersebut.

Jumlah mayoritas penduduk Surabaya adalah kelompok bumiputera. Pengelompokan ini meliputi dua budaya besar antara Jawa dan Madura. Konsentrasi komunitas Jawa cenderung mengelompok di bagian selatan kota, sementara Madura memusat di bagian utara Surabaya.<sup>32</sup> Sedangkan orang-orang bumiputera lain selain dua etnis diatas antara lain Sulawesi, Bali, Lombok, Sumatera, Ambon, Sasak dan lain-lain menyebar di antara perumahan-perumahan yang terletak di *Benedenstad* maupun *Bovenstad*.<sup>33</sup>

Dalam hierarki masyarakat bumiputera perkotaan di Surabaya, juga terdapat semacam stratifikasi sosial yang muncul akibat perbedaan keturunan, kekayaan, dan sebagainya. Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Jawa sebagai kelompok mayoritas di Surabaya, struktur sosial pertama dipegang oleh priyayi, kemudian pedagang, dan yang terakhir adalah wong cilik.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> G.H. von Faber, *Nieuwe Soerabaja....., op. cit.*, hlm. 81-82.

<sup>32</sup> Moordiaty, 'Masyarakat Tiga Jaman, Kelangsungan Hidup Perempuan Kota Surabaya', makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Sejarah Perkotaan, *Kota-Kota di Indonesia dalam Perubahan, 1900-1970*, Surabaya, 23-25 Agustus 2004.

<sup>33</sup> Handinoto dan Samuel Hartono, *loc. cit.*

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 53.

Pada awal abad ke-20, penyebutan priyayi dalam perkembangannya terdapat dua macam lapisan yakni golongan priyayi tinggi<sup>35</sup> (keturunan ningrat) dan priyayi rendah<sup>36</sup> (priyayi sekolahan). Kehidupan keseharian para priyayi ini baik sebagai priyayi tinggi maupun priyayi rendah, bisa dibilang lebih banyak mengadopsi pola kehidupan orang-orang Belanda. Mereka memiliki kecenderungan untuk merasa bahwa dirinya adalah bagian dari dan mempunyai kekuatan Belanda. Pengaruh budaya Belanda bahkan lebih erat mengikat para priyayi rendah, para raden-raden baru itu lambat laun mulai meniru penampilan Belanda dengan memakai celana panjang, kemeja beserta jas dan dasi, serta mengenakan topi. Cara bicara pun mereka lebih suka memakai logat-logat dan bahasa Belanda. Cara makan perlahan mulai mengadaptasi budaya Barat, seperti budaya *tablemanner*, memakan roti dan kue-kue, minum susu, penggunaan piranti makan Eropa dan menu hidangan campuran Jawa serta Eropa (*beafstuk*, *resouilles*, dan *soup* yang begitu mendominasi).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Priyayi tinggi adalah priyayi sebenarnya yang dilihat dari jabatan ayahnya, asal keturunan ibunya, dan asal keturunan istrinya. Secara singkat, priyayi tinggi merupakan orang bumiputera keturunan bangsawan yang juga bersekolah di sekolah-sekolah Belanda dan mendapatkan kecakapan serta ijazah resmi untuk kedudukan bupati, wedana, dan jabatan tinggi lainnya. Sartono Kartodirdjo dkk, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 7.

<sup>36</sup> Priyayi rendah adalah bumiputera diluar trah darah biru yang menjabat sebagai birokrat pemerintah kolonial. Mereka mendapatkan status kepriyayian karena menempuh jalur pendidikan di sekolah-sekolah Belanda dan memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Para priyayi rendah atau *ambtenaar* (sekarang PNS) berpendidikan Belanda (bersekolah HIS, HBS, dan MULO) dan menduduki jabatan-jabatan seperti *onderwijzer* (guru), *opziener* (penilik/pengawas), *beheerder* (kepala kantor), *commies* (komis) dan jabatan-jabatan di Pangreh Praja (*Indslands Bestuur*). Mereka digaji dan mendapatkan prestise dan tempat tersendiri di lingkungan bumiputera. *Ibid.*

<sup>37</sup> Fadly Rahman, op. cit., hlm. 49-51.

Kehidupan keseharian para priyayi yang demikian ini menunjukkan konsumsi yang bisa dibilang menyamai kehidupan orang Eropa di Surabaya. Mereka memiliki rumah-rumah elite dan pekerjaan yang tetap. Dari segi kebersihan dan cara mengelola sampahnya, mereka juga mengadopsi budaya Eropa dan pastinya mempekerjakan pembantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Golongan terbesar bumiputera Surabaya adalah wong cilik. Mereka merupakan golongan orang kebanyakan yang tidak mempunyai status priyayi, pendidikan yang tinggi, dan menguasai pekerjaan-pekerjaan kasar. Bagi orang-orang bumiputera di Surabaya yang memiliki tanah sendiri biasanya bekerja sebagai petani, sedangkan yang lainnya mencari nafkah sebagai tenaga kasar, buruh pabrik, kuli pelabuhan, atau menjadi pembuat bangunan atau kuli dan pekerjaan lain yang memerlukan tenaga fisik karena mereka tidak memiliki keterampilan dalam sektor formal.<sup>38</sup>

Sektor yang membutuhkan tenaga yang sangat besar pula berada pada pelabuhan Surabaya yang pada masa kolonial merupakan pelabuhan yang paling sibuk pada waktu itu. Aktivitas bongkar muat barang yang berlangsung setiap hari membutuhkan tenaga kerja ribuan. Belum lagi pada sektor informal pun terdapat tenaga kerja yang lumayan besar. Hal ini karena perkembangan suatu kota besar tidak lepas dari sektor informal yang selalu ada sebagai salah satu sisi lain ekonomi kota. Pekerja di sektor informal itu antara lain, menjual air, menjual

---

<sup>38</sup> Soegijanto Padmo, "Perpindahan Penduduk dan Ekonomi Rakyat Jawa 1900-1980" *Jurnal Humaniora* No. 12, September-Desember 1999, hlm. 49.

makanan atau menjajakan barang dari rumah ke rumah, pembantu rumah tangga, tukang angkut di pasar-pasar, pengemudi kendaraan tradisional, tukang sampah, dan lain-lain.<sup>39</sup>

Kehidupan keseharian para bumiputera dengan pekerjaan-pekerjaan kasar ini bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Mereka memiliki rumah-rumah semi permanen dengan susunan bangunan bambu, tripleks, atau bahkan beratap ilalang atau dedaunan dan hidup di perkampungan kumuh, terkadang menempel dibalik gedung-gedung, dan berkoloni membentuk suatu permukiman bumiputera di pinggiran kota dengan segala keterbatasannya. Keadaan ini ditambah dengan perolehan gaji yang minim, sehingga untuk biaya makan sehari-hari pun merasa kekurangan. Kebiasaan makan mereka umumnya hanya dengan satu atau dua menu sama dimakan dalam dua atau tiga kali makan. Misalnya kombinasi nasi, ikan bakar dan sayur lodeh yang dimakan dalam sehari bisa dua atau tiga kali makan. Itu bagi kalangan bumiputera yang lumayan mampu secara ekonomi, bagi bumiputera yang miskin biasanya memakan *srawut* dan umbi-umbian.<sup>40</sup> Dari segi konsumsi makanan ini bisa dipastikan bahwa mereka merupakan golongan yang paling sedikit menghasilkan sampah dalam kehidupan kesehariannya. Maka dari itu wajarlah jika *Reinigingsdienst* membuat *vuilnisverordening* bagi kampung-kampung untuk membuang sampah perharinya hanya sebesar 12 dm<sup>3</sup> atau setara dengan 0,012 m<sup>3</sup>, dan baru akan diangkut jika sudah mencapai 300 dm<sup>3</sup> atau

---

<sup>39</sup> Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang Kota...op. cit.*, hlm. 135-149.

<sup>40</sup> Fadly Rahman, *op. cit.*, hlm. 40.

setara dengan 0,3 m<sup>3</sup>.<sup>41</sup> Meskipun tergolong yang paling minim menghasilkan sampah, namun dalam perkembangan selanjutnya pertambahan penduduk bumiputera akibat urbanisasi yang terus menerus datang sejak jaman *malaise* tahun 1930, menjadikan keberadaan bumiputera diperhitungkan. Meski kehidupan di kota Surabaya bagi penduduk bumiputera tidak begitu menjanjikan. Peluang pekerjaan informal yang luas nyatanya menyebabkan kota ini menjadi salah satu kota tujuan dari para pendatang. Orang-orang dari pedesaan berbondong-bondong ke kota Surabaya untuk mengadu nasib. Kota ini tidak saja menjadi tujuan migran dari Jawa Timur saja melainkan juga dari luar provinsi. Pada tahun 1930 menurut hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk urban dari daerah sekitar Jawa Timur berjumlah 104.442 jiwa.<sup>42</sup> Jumlah yang fantastis ini tentunya merupakan masalah tersendiri bagi *gemeente*, terutama berkaitan dengan daya tampung kota dan dampak terhadap kualitas kesehatan dan kebersihan kota Surabaya. Untuk itu akhirnya *gemeente* menetapkan program *kampongverbetering* dan mencanangkan *vuilnisverordening* bagi kampung-kampung di kota Surabaya yang intensif digalakkan mulai tahun 1930.

Kebiasaan dalam hal kebersihan bagi masyarakat bumiputera dalam literatur digambarkan seolah-olah tidak memiliki nilai kebersihan. Mereka mencoba menelisik dari kacamata orang Eropa dalam memandang kebersihan menurut kebudayaan di negara Eropa. Dalam hal ini yang sengaja disinggung

---

<sup>41</sup> *Indische Bouwhygiene Door C.J. De Bruijn Gep Generaal Major Der Genie aanhangsel 1927*, hlm. 147.

<sup>42</sup> Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah*., *op. cit.*, hlm. 136-137.

adalah masalah pembagian ruang dalam melakukan aktivitas kebersihan tubuh yang membedakan antara kaum Eropa dan pribumi. Kebiasaan bumiputera yang melakukan aktivitas mandi, buang hajat dan kebutuhan cuci-mencuci di ruang terbuka seperti sungai, kali atau empang bagi mereka (orang Eropa) sangat menjijikkan. Meskipun kemudian dibangun kamar mandi umum untuk kalangan bumiputera di kampung-kampung Surabaya ketika diterapkan program *kampongverbetering*. Dengan kata lain, pembagian ruangan ini ingin menunjukkan bahwa orang Belanda dan Indo harus dijauhkan dari bumiputera yang dianggap kotor dan tidak tahu mengenai kebersihan.<sup>43</sup> Aktivitas itu dapat dilihat pada gambar 2.

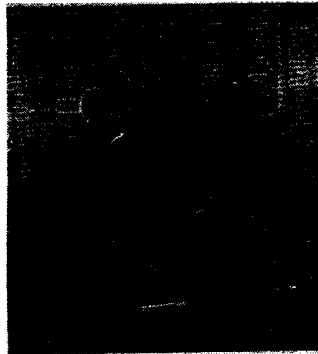
Klasifikasi kelas sosial dalam budaya mandi dan kebersihan ini juga dipraktikkan di kalangan bumiputera sendiri. Kelas elit bumiputera tidak mandi dan mencuci di sungai, bahkan mereka tidak terlihat melakukan aktivitas mandi di tempat pemandian yang sudah dibuat.<sup>44</sup> Dari kenyataan ini membuktikan bahwa pembagian konsep ruang privat dan publik yang kita kenal saat ini, sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat bumiputera. Pengenalan terhadap konsep privat ini beriringan dengan temuan teknologi toilet dan sanitasi di Eropa yang memungkinkan untuk melakukan privatisasi berbagai aktivitas dalam menjaga kebersihan.

---

<sup>43</sup> Jean Gelman Taylor, *op. cit.*, hlm. 44-45.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

**Gambar. 2**  
**Bocah Bumiputera yang Membuang Hajat di Papan Tepi Kali**



Sumber: H.F. Tillema, *Kromoblanda Deel II, Over 't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land* (Uden Masman, Den Haag, 1916 ), hlm. 132.

Khusus mengenai kebiasaan buang air besar yang dilakukan oleh masyarakat bumiputera. Selain mereka melakukan aktivitas buang air besar di sungai, adapula yang membuat lubang khusus untuk membuang hajat mereka, ketika sudah penuh maka lubang itu akan ditutup lagi dan mereka akan membuat lubang baru lagi jika ingin membuang hajat. Hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang Eropa adalah orang-orang bumiputera ketika selesai membuang hajat hanya membasuh tangannya dengan air yang mengalir. Sedangkan mereka terbiasa membasuh tangan mereka dengan sabun di wastafel yang disediakan di kamar mandinya, setelah terlebih dahulu membasuhnya dengan tisu toilet (*faecesresten*). Kebiasaan bumiputera inilah yang menurut Tillema menyebabkan cepatnya penyebaran bakteri dan virus penyebab penyakit di kalangan bumiputera.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> H.F. Tillema, *Kromoblanda Deel II, Over 't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land* (Uden Masman, Den Haag, 1916 ), hlm. 132-133.



Kebiasaan mandi, buang hajat, buang air kecil, mencuci baju, dan sebagainya yang terkait dengan kebersihan badan menurut persepsi penduduk bumiputera bukan menjadi masalah ketika dilakukan di tempat terbuka. Hal ini karena menurut mereka sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala sebelum kedatangan orang-orang Belanda ke Hindia Belanda. Mereka sudah terbiasa melakukan aktivitas berdasarkan keadaan alam yang mereka tinggali, dalam hal ini adanya sungai dan kali sebagai pusat aktivitas kebersihan mereka. Begitu juga dengan kebiasaan hanya membasuh tangan dengan air tanpa harus membasuhnya lagi dengan sabun. Bagi mereka, mandi, buang hajat besar dan kecil cukup dibasuh dengan air, jika kebutuhan air bersih sudah tercukupi maka itu sudah sesuai standar kebersihan dan bisa dipastikan suci menurut Islam.<sup>46</sup>

Telah sejak lama bahwa orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda merasa risih untuk hidup berdampingan dengan bumiputera yang menurut mereka dalam hal standar hidup masih dibawah jauh dari pola kehidupan mereka sebelumnya di Belanda. Kebiasaan mencuci baju juga setiap kali dilakukan, dan hal ini tabu dilakukan oleh bumiputera karena mereka hanya mempunyai 3 atau 4 potong pakaian. Bahkan, dalam hal minum pun orang-orang Belanda sampai awal abad ke-20, hanya meminum air yang berasal dari cairan es yang didatangkan dari Boston, yang lainnya harus puas dengan minum air yang

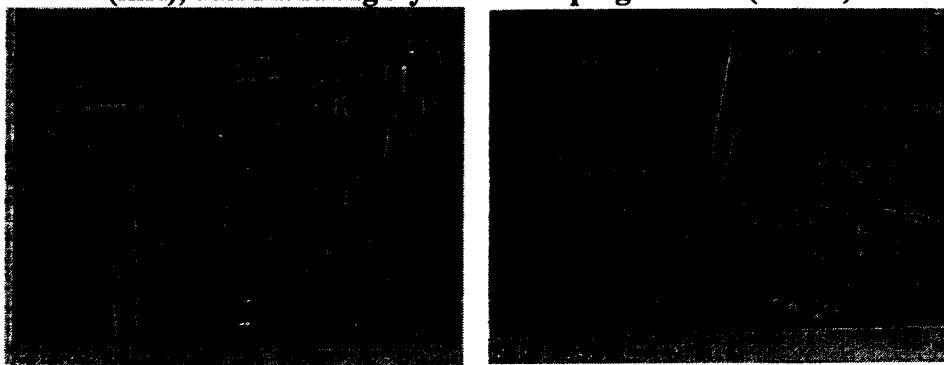
---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

disaring dan dimasak. Sampai kemudian kebiasaan meminum air yang dimasak kemudian disaring diikuti oleh kalangan bumiputera, bahkan sampai sekarang.<sup>47</sup>

Kebutuhan rumah tangga dan kebersihan rumah orang Eropa dikerjakan oleh pembantu. Maka realitas ini berkebalikan dengan kebanyakan perkampungan bumiputera yang jangankan mempunyai pembantu, untuk keperluan tempat tinggal pun mereka menyewa. Hal ini terkhusus bagi buruh-buruh pelabuhan dan pabrik-pabrik di Surabaya. Dalam sebuah kasus di Kampung Surabaya, disebutkan oleh Tillema bahwa penduduk Kampung yang bekerja sebagai buruh banyak yang memelihara ayam dengan jumlah banyak dan berkeliaran di sekeliling rumah mematuki dan memakan sisa-sisa makanan orang bumiputera. Di samping rumah itu terdapat kandang ayam dengan kondisi buruk dan sanitasi yang mengerikan, kotoran-kotoran ayam dibiarkan begitu saja tanpa ada inisiatif untuk membuangnya.<sup>48</sup> Keadaan ini dapat dilihat pada gambar 3.

**Gambar. 3**  
**Rumah Buruh di Kampung Doro dengan Ayam yang Berkeliaran (kiri), dan Kandang Ayam di Samping Rumah (kanan)**



Sumber : H.F. Tillema, *Kromoblanda Deel II, Over 't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land* (Uden Masman, Den Haag, 1916 ), hlm. 227.

---

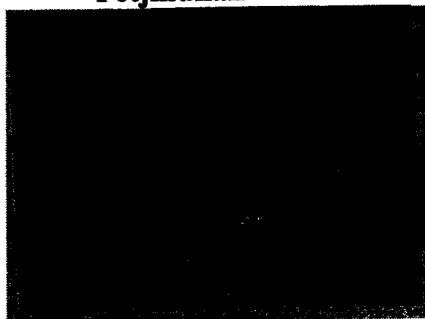
<sup>47</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 82.

<sup>48</sup> H.F. Tillema, *op. cit.*, hlm. 226 - 227.

Dari penjelasan dan gambar yang ditunjukkan oleh Tillema tersebut dapat dipastikan bahwa sebenarnya penduduk Surabaya yang memelihara ayam di rumahnya tidak pernah memproduksi sampah berupa sisa makanan. Karena mereka akan memberikannya kepada ayam-ayam yang mereka pelihara. Namun, yang menjadi masalah adalah kotoran-kotoran ayam ini tidak dibersihkan, sehingga menimbulkan polusi bau yang menyengat dan sumber penyakit baru. Apalagi pada zaman itu, kebanyakan bumiputera belum mengenakan sandal sebagai alas kaki mereka.

Menurut persepsi orang bumiputera, sampah bukan merupakan sesuatu yang penting. Mereka tidak mempermasalahkan dimana membuangnya dan akibat apa yang ditimbulkan jika dibuang disitu. Maka bukan merupakan hal yang aneh jika Tillema menemukan selokan-selokan di perkampungan bumiputera airnya tidak mengalir dan tersumbat oleh sampah-sampah dan kotoran manusia.<sup>49</sup> Lebih lanjut lihat gambar 4.

**Gambar. 4**  
**Selokan Penuh Sampah dan Kotoran Manusia di Kampung**  
**Petjindilan**



Sumber : H.F. Tillema, *Kromoblada Deel II, Over 't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land* (Uden Masman, Den Haag, 1916 ), hlm. 229.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

Analisis Tillema menyatakan bahwa selokan tersebut memiliki kedalaman  $\pm 0,80$  m. Tidak jauh dari situ sekitar beberapa ratus meter terdapat tangki septik tank. Keadaan selokan semacam ini juga tidak jauh berbeda ditemukan di permukiman orang Tionghoa. Ditemukan juga pipa-pipa tempat pencucian sayuran. Sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan jika makan sayuran mentah di Surabaya.<sup>50</sup>

Perbedaan kehidupan keseharian dalam menjaga kebersihan antara orang Eropa dan bumiputera ini kemudian menjadi pemicu lahirnya berbagai macam penyakit yang mulai mewabah di kota Surabaya awal abad ke-20. Munculnya penyakit-penyakit pes, malaria, *thypus*, diare, dan sebagainya yang muncul salah satunya karena ketidakberesan mengelola sampah membuat pemerintah kota khawatir. Meskipun pada hakekatnya penyakit-penyakit tersebut lebih banyak menyerang bumiputera karena standar kebersihan rumah dan kesehatannya yang minim. Kenyataan mewabahnya penyakit ini mulai dipikirkan karena takut akan menjangkiti orang-orang Eropa.<sup>51</sup>

Sebelum dibentuknya *gemeente* Surabaya persoalan mengenai kebersihan kota dan pengelolaan sampah belum terorganisir dengan baik. Dalam *Staatsblad* No. 149 tahun 1906 tidak dijelaskan siapa yang mengelola sampah sebelum terbentuknya *gemeente*. Disitu hanya dijelaskan bahwa sejak terbentuknya *gemeente* Surabaya, maka kewajiban yang sebelumnya dijalankan oleh

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Howard Dick, *Surabaya City of Work...*, *op. cit.*, hlm. 171.

pemerintah pusat dalam rangka mengelola kota Surabaya, selanjutnya akan diserahkan kepada *gemeente* Surabaya. Kewajiban-kewajiban tersebut salah satunya adalah penyiraman jalan raya, pengambilan sampah di sepanjang jalan, pengambilan sampah di jalan-jalan kecil dan di lapangan.<sup>52</sup>

Pada awal terbentuknya *gemeente* kewajiban pembersihan sampah dan penyiraman di jalan-jalan ditenderkan ke pihak swasta yaitu oleh kontraktor Tionghoa. Kontrak ini akhirnya berakhir karena pemerintah harus membayar mahal kepada kontraktor tersebut, namun tugas yang dikerjakan masih belum sesuai standar keinginan pemerintah.<sup>53</sup>

Menurut Howard Dick, terbentuknya *Reinigingsdienst* baru terjadi pada tahun 1916. Hal ini karena terjadi ketakutan warga Eropa terhadap wabah penyakit yang melanda kota Surabaya sejak tahun 1911.<sup>54</sup> Karena terjadi berbagai persoalan kesehatan yang semakin mengkhawatirkan selama 10 tahun setelah terbentuknya *gemeente*. Maka kemudian pada tahun 1916 itu *gemeente* mengambil alih pekerjaan pembersihan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak swasta dengan menambah satu jenis pekerjaan lagi yaitu pembersihan terhadap selokan, pipa pembuangan dan gorong-gorong.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Purnawan Basundoro, *Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya : Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012)* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2012), hlm. 14.

<sup>53</sup> F.W.M. Kerchman, *25 jaren decentralisatie in Nederlands-Indië* (TU Delft Library, 1930), hlm. 351.

<sup>54</sup> Howard Dick, *Surabaya City Of Work...*, *op. cit.*, hlm. 172.

<sup>55</sup> J.T. Bethe, "De verwijdering en verwerking van het huis en straatvuil en de reiniging der openbare wegen," dalam buku *De Hygiene in Gemeente Soerabaja*, (Soerabaja: Druk van G.C.T. van Dorp dan co. Soerabaja, 1927), hlm. 56.

Dinas Kebersihan *gemeente* Surabaya pada masa kolonial diberi nama *Reinigingsdienst*. Dinas ini bekerja di bawah naungan *Gementee Werken* atau Dinas Pekerjaan Umum dan dikepalai oleh seorang kepala dinas yang bernama J. Breeman. Dinas tersebut bertugas untuk melakukan pengambilan sampah di sepanjang jalan raya, pengambilan sampah di jalan-jalan kecil dan di lapangan, pasar, bak sampah depan rumah, selokan, pipa pembuangan serta gorong-gorong.<sup>56</sup>

## B. Keadaan Permukiman dan Kesehatan Lingkungan Kota Surabaya

Berdasarkan sejarah telah diketahui bahwa kota yang berkembang dengan cepat sering menimbulkan masalah lingkungan dan kemiskinan. Dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendapatan, pemerintah mendorong lahirnya industri dan menjadikan kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan serta menjadi pusat industrialisasi. Demikianlah kota secara lengkap menjadi pusat masalah sosial dan masalah lingkungan hidup dengan segala manifestasinya.<sup>57</sup>

Bagi orang awam biasa, masalah lingkungan hidup kelihatannya sederhana saja asal sampah buangan industri dan berbagai sumber pencemaran lainnya, sering dikaitkan pula dengan pemeliharaan kelestarian alam berupa penghijauan, reboisasi dan gerakan penanggulangan sampah. Namun, jika dikaji lebih

---

<sup>56</sup> *Verslag der Gemeente Soerabaja over 1916*, hlm. 15.

<sup>57</sup> B.N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek* (Jakarta: Andi, 2010), hlm. 101.

mendalam ternyata masalah lingkungan cukup kompleks dan mempunyai akar yang dalam pada kebudayaan dan benak manusia itu sendiri atau tingkah lakunya.<sup>58</sup>

Laporan mengenai kesehatan dan lingkungan kota Surabaya digambarkan sebagai kota yang kondisi lingkungannya tidak layak untuk dihuni. Kota ini dipenuhi dengan sampah dan kubangan air, saluran air minum yang buruk, serta kondisi kesehatan masyarakat yang memprihatinkan. Maka untuk mengatasi hal ini, kemudian didirikanlah penelitian tentang bakteriologi dan kesehatan tropis pada awal abad ke-20 untuk menjadikan kota Surabaya lebih baik.<sup>59</sup>

F.J. Rothenbuhlar dalam memorandumnya tanggal 21 Juni 1809 menilai Surabaya sebagai kota yang tidak sehat. Surabaya digambarkan sebagai kota yang memiliki rumah-rumah memprihatinkan dengan genangan air di sekelilingnya, jumlah penduduk kian meningkat namun kualitas kesehatan buruk, serta kondisi jalanan kota yang tak layak. Dalam tahun itu diangkatlah seorang komisaris yakni C.F. Harnhof, dan seorang ahli keuangan bernama van den Broek, serta ahli pembukuan bernama Belthost untuk merencanakan perbaikan kota dengan mengadakan pembersihan dan perbaikan kesehatan umum. Hal ini dilakukan karena terjadi kenaikan penduduk kota yang tidak dibarengi dengan kenaikan kesadaran mengenai kebersihan masyarakat kota Surabaya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107.

<sup>60</sup> G.H. von Faber, *Oud Soerabaiade Geshiedenis van Indies Eerste Koopstad van de Oude Tijden tot de Instelling van den Gementeraad 1906* (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931), hlm. 225.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa banyak orang Surabaya membuang kotoran di got tanpa ada air yang menyiraminya. Sampah-sampah berserakan di mana-mana serta lalat yang kotor beterbangan mengganggu warga masyarakat kota. Penyakit menyerang warga kota Surabaya seperti penyakit kulit, pes, dan bisul. Gambaran seperti itu ditemui ketika masuk di kota Surabaya dari arah jembatan Simpang. Bau busuk berasal dari kali yang penuh dengan kotoran manusia, bangkai, dan sampah yang tidak terurus.<sup>61</sup>

Kunjungan N. Van Meeteren Brouwer pada tahun 1825 di kota Surabaya mendapati perkampungan bumiputera memperlihatkan suasana kampung di pedalaman yang berbasis pada pertanian dan kerajinan. Hampir seluruh perkampungan bumiputera terdiri dari rumah-rumah gubuk dari bambu dengan atap dari dedaunan yakni *adap* atau ilalang. Kondisi seperti ini masih bertahan hingga awal abad ke-20, bahkan saat kota mengalami perluasan ke segala arah, rumah-rumah tersebut akhirnya berada di tengah-tengah kota. Rumah semacam itu oleh banyak orang dianggap kurang pantas berdiri di tengah-tengah kota.<sup>62</sup>

Kawasan pemukiman bisa dijadikan petunjuk awal untuk melihat proses perkembangan titik-titik tertentu sebagai inti perkembangan. Selain itu kawasan permukiman dapat pula menggambarkan bagaimana keadaan lingkungan hidup dan kesehatannya sebagai kawasan yang layak dan nyaman untuk ditinggali. Permasalahan pemukiman dan kesehatan erat kaitannya dengan perkembangan kota Surabaya. “*Surabaya van buiten blink, van binen sting,*” adalah ungkapan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>62</sup> Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang Kota...*, *op. cit.*, hlm.67-72.



sindiran yang diucapkan oleh orang-orang Belanda untuk menggambarkan kondisi kota Surabaya yang terlihat indah dari luar pada jalan utamanya, tetapi jika dilihat di balik jalan itu, akan ditemukan lingkungan kampung kumuh.<sup>63</sup> Pola ini masih kental membekas di Surabaya, bahkan di Surabaya bagian timur yang dibangun sekitar tahun 1980-an.

Penilaian tersebut merupakan dampak dari berlakunya sistem pemisahan atas dasar ras yang telah diatur dalam *Regering Reglement* 1854. Akibat dari belakunya sistem ini pemerintah kolonial Belanda berpikir untuk mengatur pula masalah permukiman. Pemerintah Belanda kemudian mengelompokkan tempat tinggal penduduk kota berdasarkan etnis sejak diberlakukannya *Wijkenstelsel*.<sup>64</sup> Dengan kebijakan ini maka terbentuklah di kota Surabaya kawasan permukiman Belanda dan Eropa (*Europesche Wijk*), kawasan Pecinan (*Chinese Kamp*) yang dihuni para pendatang dari Cina, kawasan Kampung Melayu (*Malaise Kamp*), dan kawasan perkampungan Arab (*Arabische Kamp*).<sup>65</sup>

Keadaan permukiman pada masa kolonial yang dibagi berdasarkan etnis dapat dijelaskan secara lebih rinci yakni:

---

<sup>63</sup> Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 123.

<sup>64</sup> *Wijkenstelsel* adalah peraturan pemerintah Belanda yang mengatur tempat tinggal bagi tiap-tiap etnis dan peraturan ini dikeluarkan tanggal 6 Juni 1886. Anjarwati Noorjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)* (Semarang: Mesias, 2004), hlm. 10

<sup>65</sup> Lihat Lilianny Sigit Arifin, "Berkurangnya Pengaruh Kolonial pada Wajah Perumahan di Surabaya: Studi Kasus Perumahan di Seruni 1900-2000," dalam Freek Colombijn (ed.), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 471

### 1. Permukiman Masyarakat Belanda dan Eropa (*Europesche Wijk*)

Permukiman masyarakat Belanda dan Eropa pada awalnya menempati wilayah-wilayah yang berada di pusat kota yaitu di sekitar daerah Simpang dan sebelah barat Jembatan Merah. Di sini pula (depan Jembatan Merah) dibangun kantor Residen Surabaya yang menjadi pusat kegiatan pemerintah kolonial Belanda, disamping itu pula berkembang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan perekonomian kota.<sup>66</sup>

Pada tahun 1905, daerah Keputran dijadikan daerah perumahan elit atau bungalow bagi masyarakat Belanda. Tahun 1915, *Gemeenteraad* mulai merencanakan perbaikan-perbaikan lingkungan perumahan dan pengadaan perumahan rakyat bekerja sama dengan pihak swasta. Pada tahun 1917, mulai dibangunlah rumah-rumah percontohan untuk golongan menengah pegawai negeri di daerah Ketabang, Undaan, Ambengan, Gubeng, dan lain-lain.<sup>67</sup>

Kompleks perumahan masyarakat Eropa ini rata-rata berbentuk villa yang mempunyai halaman luas baik di depan maupun di belakang rumah dan dibatasi pagar tinggi. Bagi kalangan masyarakat Eropa menengah ke atas, rumah mereka dilengkapi dengan paviliun dan barang-barang mewah. Masyarakat Eropa di Surabaya hidup dalam kemewahan karena mempunyai kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan golongan masyarakat lainnya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940* (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 49.

<sup>67</sup> Lilianny Sigit Arifin., *op. cit.*, hlm. 471-472.

<sup>68</sup> Djoko Soekiman, *op. cit.*, hlm. 31.

Keadaan permukiman Eropa rata-rata menunjukkan lingkungan yang sesuai standar kebersihan. Rumah-rumah tersebut tertata rapi, bersih, asri, dan nyaman untuk ditinggali. Permukiman masyarakat Eropa memiliki sistem sanitasi yang baik dan berbagai fasilitas yang lengkap, seperti: jalan lebar dan beraspal, air bersih, penerangan, taman, jalan transportasi umum dan tempat sampah. Setiap kawasan perkampungan Eropa terdapat saluran air dan selokan. Selokan-selokan ini selalu dibersihkan secara rutin sebanyak 2 kali seminggu ketika musim hujan, sedangkan ketika musim kemarau dibersihkan seminggu sekali.<sup>69</sup> Selain itu di dalam permukiman orang Eropa terdapat berbagai fasilitas yang sengaja dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menunjang kepentingan pemerintah kolonial Belanda, maupun orang-orang Eropa. Beberapa fasilitas itu diantaranya adalah rumah sakit, gereja, sekolah, galangan kapal, gudang-gudang milik pemerintah, gudang senjata, dan kantor perusahaan dagang.<sup>70</sup> Kawasan permukiman Eropa tumbuh menjadi pusat perdagangan dan ekonomi kota. Mereka berlomba membeli tanah di sekitar wilayah ini, meskipun pada akhirnya *gemeente* mengeluarkan larangan untuk membeli tanah milik bumiputera. Namun, hal ini tidak diindahkan. Bahkan karena kebutuhan akan permukiman orang Belanda dan Eropa semakin meningkat, *gemeente* melakukan upaya penghancuran permukiman lama yang dihuni oleh masyarakat bumiputera dan memaksa mereka untuk pindah.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Verslag van den toestand der Stadgemeente Soerabaja over het jaar 1932* (N.V. Koninklike Boekhandel en Drukkerij G. Kolff en CO. Soerabaja, 1933), hlm. 189.

<sup>70</sup> Handinoto, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>71</sup> Anjarwati Noorjannah, *op. cit.*, hlm. 11.

Pengaturan permukiman Eropa dilakukan oleh perusahaan *N.V. Volkhuysvesting* yang didirikan pada tahun 1927. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pemerintah milik *gemeente* yang melakukan berbagai pembangunan perumahan.<sup>72</sup> Sebenarnya sebelum berdirinya perusahaan ini telah dilakukan berbagai pembangunan perumahan milik warga Belanda dan Eropa. Terutama pembangunan perumahan elite di wilayah Gubeng pada tahun 1908, di daerah Sawahan dan terakhir di Darmo. Kondisi perumahan Eropa ini telah menggunakan batu bata mencapai kisaran 91 persen sebagai bahan bangunan.<sup>73</sup> Kenyataan ini membuktikan bahwa kompleks perumahan Belanda dan Eropa merupakan permukiman yang layak dengan berbagai fasilitas lingkungan dan kesehatan yang memadai untuk ditinggali.

## 2. Permukiman Masyarakat Tionghoa

Permukiman etnis Tionghoa pada pertengahan Abad ke-19 meliputi wilayah *Topekong Straat*, *Chineesche Voorstraat*, *Chineesche Breestraat*, *Suiker Straat*, *Bibis Straat*, dan *Handelstraat* (sekarang jalan Kembang Jepun). Tujuh wilayah permukiman itu disebut Pecinan Lama.<sup>74</sup>

Penduduk Tionghoa di Pecinan Lama ini semakin padat dan terus bertambah. Menyikapi hal ini kemudian dibentuklah wilayah Pecinan Baru yang

---

<sup>72</sup> Howard Dick, *Surabaya City of Work, a Sosial Economy 1900-2000* (Ohio: Ohio University Press, 2001), hlm. 119.

<sup>73</sup> Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga....*, *op. cit.* hlm. 11.

<sup>74</sup> The Kian Lok, *Rumah Abu: Sebuah Kenangan "Rumah Sembahyang The Goon Tjing (The Sie Siaw Yang Tjohbiauw) 1883-2001"*, (Surabaya: t.pn, 2001).

meliputi Kapasan Boen Bio, Kapasan gang Majoor, dan Kapasan Bedoro, Pasar Bong, *Chineesche Buitenweg* hingga *Bibisbrug*, dan Bunguran.<sup>75</sup> Kawasan Pecinan juga ditandai dengan sebuah gapura bergaya arsitektur Tiongkok yang dipasang di Pecinan Lama yaitu depan *Handelstraat*, sebelah timur Jembatan Merah sebagai pintu masuk ke wilayah tersebut.<sup>76</sup>

Perluasan wilayah Pecinan pada akhir abad ke-19 tidak dapat menyelesaikan masalah pemukiman etnis Tionghoa. Meningkatnya jumlah kelahiran dan imigran dari Tiongkok ke Surabaya menjadikan Pecinan berkembang menjadi perkampungan yang sangat padat dan beberapa gang kecil seperti gang-gang kecil di Kapasan tampak sangat kumuh dan tidak sehat. Mereka yang tinggal di dalam gang-gang bekerja sebagai pelayan toko dan tukang, seperti tukang jam, tukang jahit, tukang pangkas, tukang kayu, buruh pabrik rokok dan lain-lain.<sup>77</sup>

Pada tahun 1910, pemerintah kolonial Belanda mulai melonggarkan peraturan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*. Perubahan dua peraturan tersebut menyebabkan tempat yang dijadikan pemukiman etnis Tionghoa di Surabaya menjadi lebih luas. Selain itu, juga mengakibatkan bergesernya pemukiman masyarakat bumiputera, sehingga batas-batas pemukiman menjadi semakin tidak jelas. Pada awal abad ke-20, beberapa wilayah pemukiman masyarakat

---

<sup>75</sup> Untuk mengetahui perubahan nama-nama jalan di Surabaya pada masa kolonial Belanda dengan masa sekarang, lihat Dukut Imam Widodo, *Soerabaia Tempo Doeloe* jilid II (Surabaya: Dinas Pariwisata Surabaya, 2000), hal. 453-455.

<sup>76</sup> Handinoto, *Perkembangan Kota...*, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>77</sup> G.H. von Faber, *Oud Soerabaia...*, *op. cit.*, hlm. 80.

bumiputera yang mulai bergeser dan menjadi wilayah pemukiman etnis Tionghoa, diantaranya adalah Kaliondo, Kalianyar, Ngaglik, dan Keputran.<sup>78</sup>

Umumnya rumah-rumah etnis Tionghoa berupa bangunan permanen dan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pemakaian atap pelana dan mempunyai sudut lengkung dan diberi hiasan ular naga atau ikan berwarna merah. Namun, tidak semua rumah bercirikan hal itu hanya rumah golongan mampu dan terletak sekitar klenteng. Selain sebagai tempat tinggal, biasanya rumah-rumah mereka juga berfungsi sebagai toko.<sup>79</sup>

Pada tahun 1930-an, wilayah pemukiman etnis Tionghoa semakin padat. Perluasan wilayah pecinan ke arah utara, timur dan selatan belum dapat menampung seluruh orang Tionghoa yang datang dan menetap di Surabaya. Masalah kepadatan penduduk itu semakin parah ketika semakin banyak jumlah etnis Tionghoa miskin akibat dari krisis ekonomi. Untuk menyelesaikan masalah itu Departemen Perumahan Rakyat membangun pemukiman bagi etnis Tionghoa yang berdampingan dengan wilayah pemukiman masyarakat bumiputera. Diantaranya, pemukiman etnis Tionghoa dibangun di Simolawang, Sidodadi, Tambaksari (Ketabang Timur). Untuk dapat menempati pemukiman tersebut, pemerintah menawarkan sewa rumah dengan harga yang cukup murah dan terjangkau bagi orang Tionghoa miskin. Pembauran dengan bumiputera ini

---

<sup>78</sup> Untuk mengetahui daftar wilayah pemukiman orang-orang Tionghoa pada dekade ke-2 abad ke-20, lihat *verslag der gemeente Soerabaia over 1913*.

<sup>79</sup> Lilianny Sigit Arifin., *loc. cit.*

menyebabkan rumah-rumah etnis Tionghoa terlihat kotor, kumuh dan kurang nyaman ditinggali.<sup>80</sup>

Keadaan permukiman etnis Tionghoa di kota Surabaya setidaknya terdapat dua macam kriteria. Kriteria tersebut membedakan di lingkungan mana komunitas etnis Tionghoa tersebut bermukim. Hal ini karena terdapat pembauran etnis Tionghoa ke kompleks permukiman bumiputera, Eropa, maupun Arab. Jika permukiman Tionghoa di sekitar lingkungan Eropa, maka sudah pasti segala fasilitas yang berkaitan dengan pemenuhan standar kebersihan dan kesehatan menjadi terjamin. Bahkan dalam sisi arsitektur bangunan pun, banyak yang mengadopsi arsitektur khas rumah orang Eropa.<sup>81</sup> Namun, akan menjadi berbeda ketika komunitas Tionghoa berbaur dengan permukiman bumiputera yang tentunya jauh dari standar-kebersihan dan terkesan kumuh. Mereka biasanya merupakan golongan Tionghoa miskin yang hanya mampu menyewa rumah standar untuk bertahan hidup di Surabaya.<sup>82</sup> Permukiman etnis Tionghoa yang mengelompok di kawasan pecinan lama maupun baru setidaknya menunjukkan bahwa keadaan lingkungan dan kebersihannya relatif terjamin. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas sanitasi berupa saluran air, selokan, dan penerangan di lingkungan tersebut. Selain itu, kawasan tersebut telah diberlakukan peraturan sampah sejak awal pengumumannya pada tahun 1922.

---

<sup>80</sup> G.H. von Faber, *Nieuwe Soerabaia...*, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>81</sup> Berdasarkan gambar kompleks permukiman Tionghoa di sepanjang jalan Handelstraat (Lihat lampiran 10).

<sup>82</sup> G.H. von Faber, *loc. cit.*

### 3. Permukiman Masyarakat Arab

Permukiman masyarakat Arab di daerah utara Surabaya mudah sekali dikenali karena mempunyai sebuah masjid yang terkenal dengan sebutan "Masjid Ampel" karena konon didirikan oleh Sunan Ampel. Wilayah pemukiman etnis Arab atau Kampung Arab meliputi, Songoyudan, Panggung, Pasar Pabean, Sasak, dan Ampel. Permukiman ini lebih dikenal dengan nama kampung Ampel dengan keunikan banyaknya gang-gang dan jalan kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan mempunyai nama-nama seperti Ampel Suci, Ampel Gading, Ampel Blumbang, Ampel Onto, Ampel Wagfur, Ampel Masjid, dan masih banyak lagi. Hal ini menyebabkan kampung Ampel ini merupakan sebuah kampung yang tertutup dan mengarah ke Masjid.<sup>83</sup> Hal yang menarik adalah, jika dibandingkan dengan wilayah pemukiman orang Eropa dan etnis Tionghoa, pemukiman etnis Arab lebih bersifat heterogen. Hal itu disebabkan, di dalam pemukiman tersebut juga tinggal orang-orang Koja, Benggala, Jawa, dan Madura yang beragama Islam.

Pada abad ke-19 disebutkan oleh Berg bahwa wilayah tempat tinggal orang-orang Arab di Surabaya terletak di bagian Timur Laut kota. Jalan-jalannya kebanyakan kotor, sempit, dan rusak. Di sana dijumpai banyak toko dan sejumlah rumah yang kokoh serta terawat dengan baik.<sup>84</sup> Namun seiring dengan perkembangan jaman, perbaikan jalan dan segala infrastruktur kota di daerah

---

<sup>83</sup> Liliyany Sigit Arifin, *op. cit.*, hlm. 473.

<sup>84</sup> La Ode Rabani dan Artono, "Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahannya di Kota Surabaya 1900-1942" dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No.2 Tahun 2005*, hlm. 122.



perkampungan Arab terus diperbaiki. Sehingga bisa dipastikan pada Abad ke-20, wilayah perkampungan Arab menjadi wilayah yang sudah lumayan layak untuk ditinggali meskipun jumlah penduduknya juga bertambah banyak dan heterogen.

Wilayah kampung Arab menunjukkan keberagaman penduduk yang menghuninya. Kenyataan inilah yang kemudian melahirkan sebuah realitas bahwa di perkampungan Arab setidaknya keadaan lingkungan dan kebersihan lebih condong dengan kesan kumuh dan kurang teratur. Dalam sebuah laporan *verslag BOW* tahun 1916 menyebutkan bahwa di wilayah perkampungan Arab dan Tionghoa, pelaksanaan pengambilan sampah sampai dilakukan beberapa kali pengambilan pada waktu sore hari. Laporan tersebut juga menuliskan bahwa perkampungan Arablah yang paling banyak menghasilkan sampah.<sup>85</sup> Laporan *verslag* tersebut mungkin menyebutkan perkampungan Arab lama. Dalam sebuah laporan *verslag* terbaru yakni tahun 1930, mencantumkan bahwa daerah Ampel baru ditetapkan peraturan sampah pada tahun itu yang berbarengan dengan diterapkannya peraturan sampah di kampung-kampung bumiputera.<sup>86</sup> Laporan *verslag* tahun 1930, tidak menjelaskan kawasan Ampel bagian mana yang diterapkan peraturan sampah, bisa jadi yang dimaksud adalah kawasan perluasan wilayah Ampel yang baru dihuni oleh orang-orang Arab dan etnis-etnis lain. Sayangnya keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut tidak ditemukan dalam literatur manapun.

---

<sup>85</sup> *Verslag over de Burgelijke Openbare Werken in Nederlandsh-Indie over het jaar 1916* (Batavia: NV. Uitgevers mij Papyrus, 1919), hlm. 94.

<sup>86</sup> *Verslag van der toestand der Gemeente Soerabaja over 1930*, hlm. 262.

#### 4. Permukiman Masyarakat Bumiputera

Pada mulanya permukiman masyarakat bumiputera pada zaman pra kolonial banyak menempati di daerah pertanian dekat muara sungai Kalimas yang berkultur agraris. Tetapi ketika zaman kolonial, masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan tempat, bahkan daerah perkampungan mereka terjepit di tengah-tengah. Mereka menempati tanah-tanah yang tersisa atau dibalik gedung-gedung milik penduduk Eropa, Tionghoa maupun Arab.<sup>87</sup> Bahkan pada awal abad ke-20, masih banyak rumah-rumah di kota Surabaya yang masih berbentuk seperti aslinya yakni berkultur agraris. Rumah-rumah ini merupakan rumah peninggalan masa lalu yang dibangun di sekitar ladang pertanian. Saat kota mengalami pemekaran di segala arah, rumah-rumah sederhana ini masih bertahan di tengah-tengah kota. Meskipun orang-orang yang menempatnya bukan lagi bekerja sebagai petani melainkan beralih ke sektor informal yang lain.<sup>88</sup>

Penduduk bumiputera ini juga merupakan korban dari penguasa tanah partikelir, mereka umumnya terusir dari tanah tersebut dan mendirikan rumah-rumah seadanya. Hal ini karena mereka membangun rumah dalam keadaan terusir dan tidak memiliki harta yang cukup untuk membuat rumah yang layak. Kondisi rumah-rumah yang berdisi serampangan di tanah-tanah kosong ini dinilai oleh Von Faber lebih mirip dan lebih layak sebagai kandang binatang. Contoh dari kasus ini adalah terusirnya penduduk bumiputera di tanah partikelir Darmo, mereka membangun kampung baru di sekitar Gunungsari sampai ke arah utara di

---

<sup>87</sup> Dewi Indah Pratiwi, 'Penyakit Pes di Surabaya 1910-1930' *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, 2010), hlm. 26.

<sup>88</sup> Purnawan Basundoro, *Merebut Ruang....., op. cit.*, hlm. 72-73.

kampung Kembangkuning.<sup>89</sup> Untuk mengetahui bagaimana kondisi rumah penduduk kota berdasarkan etnis dapat dilihat di tabel 3 dibawah ini.

**Tabel. 3**  
**Presentase (%) Jenis Rumah Berdasarkan Kelompok Etnis di Kota Surabaya Tahun 1930**

<b>Kelompok Etnis</b>	<b>Rumah Batu Bata</b>	<b>Rumah Non-Batu Bata</b>	<b>Lain-Lain</b>	<b>Tidak Diketahui</b>	<b>Total</b>
Eropa	91	4	-	5	100
Cina	63	30	1	6	100
Etnis Lain	77	16	1	6	100
Bumiputra	16	64	13	7	100
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Sumber : H.W. Dick, *Surabaya City of Work : A Socioeconomic History, 1900-2000*, (Athens: Ohio University Press, 2002), hlm. 143.

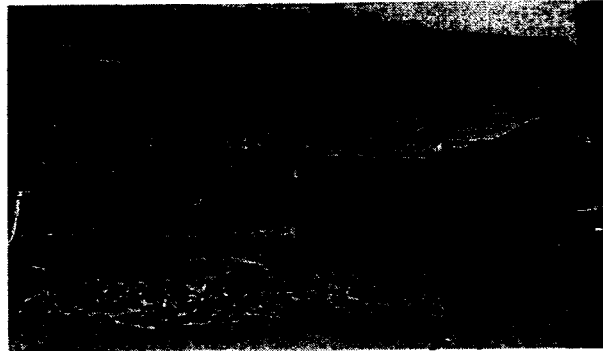
Tabel diatas semakin memperjelas bagaimana kondisi permukiman penduduk bumiputera dibandingkan dengan berbagai etnis lain yang mendiami kota Surabaya. Masyarakat bumiputera merupakan golongan terbesar yang masih tinggal di rumah-rumah non-permanen pada masa kolonial, berbanding terbalik dengan golongan masyarakat Eropa dan Tionghoa.

Kondisi permukiman bumiputera ini jauh dibilang sebagai hunian yang layak untuk ditinggali. Menurut Johan Silas, permukiman penduduk bumiputera pada tahun 1908-1927 dijabarkan sangat buruk, sehingga tidak jarang menjadi sumber munculnya permasalahan kota seperti masalah sanitasi dan beragam penyakit. Pada umumnya rumah mereka terbuat dari bambu dan beratapkan ilalang, jerami atau daun-daunan. meskipun ada pula rumah yang terbuat dari batu

<sup>89</sup> G. H. Von Faber, *Nieuw Soerabaia...*, *op. cit.*, hlm. 155-162.

bata. Mereka hidup berdesak-desakan dengan bangunan yang berhimpit, bertingkat yang semakin menambah kesan kumuh kondisi kampung.<sup>90</sup>

**Gambar. 5**  
**Tumpukan Sampah di Belakang Rumah Bumiputera yang Terbuat dari Bambu.**



Sumber: G.H. von Faber, *Nieuwe Soerabaia: de Geschiedenis van India's Eerste Kooptad in the Eerste Kwarteeuw Sedert hare Instelling 1906-1931* (Soerabaia: N.V. Boekhandel en Drukkerij H. van Ingen, 1933), hlm. 156.

Rumah-rumah dihubungkan dengan jalan yang kotor. Pada musim kemarau udara di kampung menjadi panas dan berdebu. Sementara itu apabila musim hujan datang, maka tempat-tempat yang rendah dan saluran-saluran air yang tidak memadai akan menyebabkan kampung tergenang air dalam waktu yang cukup lama. Kondisi kampung semacam ini menjadi sarang penyakit, yaitu kolera, tipus, influenza, serta pes.<sup>91</sup> Belum lagi sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan pun dibuang sembarangan di sisi rumah atau bahkan dibuang di saluran-saluran air di sekitarnya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan banjir

---

<sup>90</sup> Johan Silas, *Program Perbaikan Kampung di Surabaya 1969-1982, Suatu Inventarisasi dan Evaluasi*, (Surabaya: Badan Pelaksana Pembangunan Program Perbaikan Kampung Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II, 1983), hlm. 9-10.

<sup>91</sup> Dewi Indah Pratiwi, *op. cit.*, hlm. 29.

menggenangi tempat tinggal bumiputera jika musim hujan.<sup>92</sup> Selain itu permukiman bumiputera tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai seperti sistem sanitasi yang buruk, kurangnya sumber air bersih serta sistem penerangan yang jelek.<sup>93</sup>

Sampai pada tahun 1927, pemerintah mulai membangun perumahan untuk buruh-buruh kasar di daerah Sidodadi (yang didominasi oleh para kuli etnis Madura), di daerah Ngaglik dan Tambaksari.<sup>94</sup> Sementara masyarakat bumiputera yang mempunyai kedudukan di pemerintahan menempati daerah perumahan di daerah Ambengan, Kusuma Bangsa, dan Jimerto. Bentuk-bentuk rumah menyerupai bungalow milik masyarakat Belanda yang disederhanakan. Pada tahun 1930, *Gemeente* mulai menyerahkan pembangunan perumahan rakyat kepada Perusahaan Perumahan Rakyat untuk membangun perumahan di daerah jalan Undaan untuk disewa dengan harga sewa 40-80 gulden.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Howard Dick, *Surabaya...*, *op. cit.*, hlm. 153.

<sup>93</sup> William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia* ( Jakarta:Gramedia 1989), hlm. 15.

<sup>94</sup> Lilianny Sigit Arifin, *op .cit.*, hlm 474.

<sup>95</sup> *Ibid.*